

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik tiga simpulan utama yang secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Pertama, pengelolaan KKG Gugus Kartini Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap telah menjalankan keempat fungsi manajerial POAC, namun dengan tingkat efektivitas yang belum merata. Fungsi perencanaan (planning) telah berjalan dengan cukup baik, ditandai oleh tersusunnya program kerja tahunan yang disusun secara kolaboratif dan mendapat pengesahan formal dari pejabat yang berwenang. Fungsi pengorganisasian (organizing) memiliki landasan formal yang memadai berupa SK Kepengurusan Periode 2023–2026 dengan 15 personil, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal karena tidak semua pengurus menjalankan fungsi dan tugasnya secara konsisten. Fungsi pelaksanaan (actuating) menunjukkan hasil yang relatif lebih baik, terutama melalui kegiatan simulasi mengajar dan penyusunan perangkat pembelajaran secara kolaboratif yang dirasakan paling efektif oleh guru anggota. Pola pertemuan dua kali dalam sebulan berjalan secara rutin, meskipun antusiasme peserta belum merata. Fungsi pengawasan (controlling) merupakan aspek yang paling lemah, ditandai oleh ketiadaan mekanisme monitoring formal yang terstruktur untuk memastikan implementasi hasil KKG di kelas. Dampak kegiatan KKG terhadap kinerja guru tergambar dari peningkatan nilai PKG gugus dari 85,14 (2022) menjadi 86,12

(2023) dan 86,72 (2024), namun Angka Kredit guru tetap stagnan selama tiga tahun berturut-turut, mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja belum diiringi oleh pengembangan keprofesian yang berkelanjutan dan terukur.

Kedua, terdapat tiga kelompok hambatan utama dalam upaya optimalisasi pengelolaan KKG Gugus Kartini. Hambatan pertama bersifat struktural, yaitu keterbatasan dana operasional yang bergantung pada swadaya sekolah anggota dan dana BOS tanpa alokasi khusus dari Dinas Pendidikan, serta fasilitas pendukung yang belum memadai — terutama ketersediaan laptop, proyektor LCD, dan jaringan Wi-Fi di ruang PKG. Hambatan kedua bersifat psikologis-motivasional, yaitu rendahnya antusiasme dan keaktifan sebagian guru dalam mengikuti kegiatan KKG, yang ditandai oleh kesenjangan antara pengetahuan yang tinggi tentang KKG (100%) dengan persepsi positif yang hanya mencapai 25% dan sikap positif yang hanya 37,5%. Hambatan ketiga bersifat manajerial, yaitu lemahnya koordinasi antar lembaga (KKG–KKKS–Pengawas–Dinas Pendidikan), tidak adanya mekanisme monitoring formal, serta stagnannya Angka Kredit guru termasuk SDN Bener 02 yang hanya mencapai AK 14,75 sebagai nilai terendah dalam gugus.

Ketiga, upaya-upaya optimalisasi yang telah dan sedang dilakukan oleh KKG Gugus Kartini mencakup empat dimensi. Dalam dimensi perencanaan, pengurus mulai menerapkan pendekatan needs-based planning dengan mengakomodasi masukan dari guru anggota sebelum program ditetapkan. Dalam dimensi pelaksanaan, terdapat upaya diversifikasi metode kegiatan melalui kombinasi simulasi, peer coaching, lesson study, dan pelatihan PMM guna meningkatkan relevansi dan daya tarik kegiatan. Dalam dimensi pengawasan,

inisiasi penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai wahana monitoring digital mulai dikembangkan, didukung oleh dorongan pengawas agar setiap pertemuan menghasilkan output konkret dan terdokumentasi. Dalam dimensi partisipasi, upaya peningkatan motivasi guru dilakukan melalui program best practice sharing dan diseminasi PTK yang memberikan penghargaan tidak formal

5.2 Implementasi Hasil Penelitian

Bagian ini menguraikan bentuk aplikasi nyata dan langkah taktis yang diimplementasikan berdasarkan temuan penelitian untuk mengoptimalkan kinerja guru melalui wadah KKG Gugus Kartini:

1. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan melalui *Action Plan*

Terukur: Hasil penelitian mengenai kelemahan fungsi pengawasan diimplementasikan dengan mewajibkan setiap guru anggota KKG menyusun lembar draf *Action Plan* (Rencana Tindak Lanjut) pasca-pertemuan formal. Guru mengimplementasikan modul ajar, instrumen penilaian, atau strategi diferensiasi yang disimulasikan di KKG langsung ke ruang kelas mereka pada minggu berikutnya. Hasil penerapan ini dicatat secara ringkas untuk dibahas pada sesi refleksi awal pertemuan KKG berikutnya.

2. Digitalisasi Pengawasan dan Kolaborasi melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM):

Sebagai langkah konkret mengatasi hambatan pengawasan geografis dan keterbatasan waktu pengawas, diimplementasikan optimalisasi fitur PMM sebagai wadah pemantauan. Guru mengunggah bukti karya dan praktik baik hasil diskusi KKG ke PMM.

Pengawas sekolah dan kepala sekolah memanfaatkan platform digital ini untuk mengontrol perkembangan kompetensi pedagogik dan profesional guru secara berkala tanpa mengganggu jam mengajar.

3. Restrukturisasi Metode Kegiatan KKG (Fokus pada Kebutuhan Praktis Guru): Untuk mengatasi kendala rendahnya antusiasme guru akibat materi yang monoton , format pertemuan KKG diubah dari yang semula didominasi ceramah kedinasan menjadi bentuk workshop klinis kolaboratif. Implementasinya berfokus pada pendampingan pembuatan administrasi pembelajaran yang efisien (seperti Modul P5 dan perangkat Kurikulum Merdeka) , sehingga langsung membantu meringankan beban administratif yang selama ini dikeluhkan oleh para guru.
4. Pembangunan Forum Koordinasi Kuadran (FKK): Guna mengatasi hambatan ego-sektoral dan lemahnya koordinasi antar-lembaga , diimplementasikan sebuah forum koordinasi berkala yang mempertemukan Pengurus KKG, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Pengawas Pembina, dan perwakilan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan. Forum ini berfungsi menyelaraskan ketersediaan anggaran sekolah (dana BOS) dengan pembiayaan program prioritas KKG, serta memastikan adanya sinkronisasi dalam penilaian Angka Kredit (AK) guru.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, berikut disampaikan rekomendasi operasional yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem KKG Gugus Kartini.

A. Rekomendasi untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap

Pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap perlu mengalokasikan anggaran khusus dan reguler untuk mendukung operasional kegiatan KKG, termasuk honorarium narasumber, pengadaan fasilitas pendukung (laptop, proyektor, WiFi), dan biaya transportasi guru anggota dari sekolah-sekolah yang lebih jauh. Kedua, Dinas perlu mengembangkan sistem insentif bagi guru yang aktif dan produktif dalam KKG, misalnya melalui pengakuan capaian KKG sebagai komponen dalam penilaian kinerja tahunan. Ketiga, perlu ada kebijakan khusus yang mendorong peningkatan Angka Kredit guru, mengingat stagnannya AK selama tiga tahun berturut-turut merupakan indikator lemahnya pengembangan keprofesian berkelanjutan di gugus ini.

B. Rekomendasi untuk Pengawas Sekolah

Pengawas Sekolah direkomendasikan untuk mengintensifkan supervisi akademik yang bersifat konsultatif dan fasilitatif bukan sekadar administratif dengan frekuensi yang lebih teratur. Pengawas perlu mengembangkan mekanisme monitoring berkala terhadap implementasi hasil KKG di kelas, misalnya melalui instrumen observasi kelas yang diisi bersama kepala sekolah. Selain itu, pengawas

perlu memperkuat koordinasi tripartit antara dirinya, Ketua KKKS, dan Pengurus KKG melalui forum koordinasi yang rutin dan terdokumentasi.

C. Rekomendasi untuk Kepala Sekolah

Kepala sekolah direkomendasikan untuk mengalokasikan dana BOS secara proporsional guna mendukung keaktifan guru dalam kegiatan KKG, termasuk untuk transportasi dan pengadaan materi pelatihan. Kepala sekolah juga perlu secara aktif memotivasi guru-guru di sekolahnya untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan KKG, serta melakukan monitoring mandiri terhadap implementasi hasil KKG di kelas melalui supervisi pembelajaran yang terjadwal.

D. Rekomendasi untuk Pengurus KKG

Pengurus KKG direkomendasikan untuk: (1) menyusun program kerja berdasarkan asesmen kebutuhan (needs assessment) yang dilakukan secara formal di awal setiap semester; (2) membangun sistem monitoring dan evaluasi yang sederhana namun konsisten, misalnya dengan mewajibkan setiap guru menyerahkan laporan singkat implementasi hasil KKG di kelas pada pertemuan berikutnya; (3) menerapkan rotasi tugas narasumber internal agar semua guru berkesempatan berkontribusi dan merasa memiliki KKG; serta (4) memastikan setiap pertemuan menghasilkan output konkret, seperti draf RPP, modul ajar, instrumen penilaian, atau media pembelajaran yang langsung dapat digunakan.

E. Rekomendasi untuk Guru Anggota KKG

Guru anggota KKG direkomendasikan untuk: (1) meningkatkan kehadiran dan keaktifan secara konsisten dalam setiap pertemuan KKG, mengingat regularitas

partisipasi merupakan prasyarat utama efektivitas KKG; (2) menyusun action plan nyata setelah setiap pertemuan dan mendokumentasikan implementasinya di kelas; (3) melakukan refleksi diri secara berkala terhadap dampak kegiatan KKG pada praktik mengajar di kelas; serta (4) secara aktif mengembangkan keprofesian melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), termasuk menulis artikel ilmiah, melaksanakan PTK, dan memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar sebagai sarana belajar mandiri.

F. Rekomendasi untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk: (1) melaksanakan penelitian kuantitatif guna mengukur secara statistik besaran pengaruh optimalisasi pengelolaan KKG terhadap kinerja guru di Gugus Kartini atau gugus-gugus lain di Kabupaten Cilacap; (2) mengembangkan model pengelolaan KKG yang terstandar dan berbasis ICT yang dapat diadaptasi oleh gugus-gugus lain; serta (3) meneliti dampak jangka panjang kegiatan KKG terhadap prestasi belajar siswa sebagai indikator mutu pendidikan di tingkat sekolah dasar.